

21/Renja/DPMP2TA /2020 Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



## RENCANA KERJA (RENJA RANCANGAN AKHIR)

TAHUN 2021

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



invest in

aceh

Jl. Ahmad Yani No. 39  
Banda Aceh, Indonesia

P : +6265123170, F :  
+6265123171

E : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)  
W : [dpmp2ta.acehprov.go.id](http://dpmp2ta.acehprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan “**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021**” yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Aceh melalui bidang penanaman modal.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi tercapainya cita-cita pembangunan di bidang penanaman modal dalam rentang satu tahun kedepan.

Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 yaitu “**Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani**”. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Banda Aceh,        Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 199203 1 002

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Pengertian Renja .....	3
1.1.2 Proses Penyusunan Renja .....	3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	6
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019.....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	11
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	12
2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota Dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional .....	12
2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	13
2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program .....	14
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan DPMPTSP .....	15
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting .....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA .....	16
2.4.1 Rancangan Awal RKPA dengan Analisis Kebutuhan Dilaksanakan .....	16
2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan Tersebut Dilaksanakan .....	17
2.4.3 Rancangan Awal RKPA Rumusan Program dan Kegiatan .....	17

2.4.4	Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun Yang di Rencanakan (Tabel T-C.31) .....	19
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
2.5.1	Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan .....	19
2.5.2	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Perangkat Daerah .....	19
2.5.3	Tabel Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Tabel T-C.32) .....	19
<b>BAB III.</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	20
3.1.1	Uraian Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah .....	20
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP .....	21
3.2.1	Uraian Tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran .....	21
<b>BAB IV.</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>22</b>
4.1	Program dan Kegiatan .....	22
4.1.1	Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021 .....	22
4.1.2	Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan .....	22
4.1.3	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun Rencana dan Perkiraan Maju Rencana Tahun Selanjutnya .....	25
4.2	Pendanaan .....	25
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
5.1	Kaidah Pelaksanaan .....	26
5.2	Catatan Penting .....	26
5.3	Rencana Tindak Lanjut .....	26
<b>LAMPIRAN</b>		
Formulir E-29	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah	
Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra Tahun 2019	
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA DPMPTSP	
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2021 Provinsi Aceh	
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Tahun 2021 Provinsi Aceh	
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 DPMPTSP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Aceh dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor-impor. Diantara faktor-faktor tersebut, hanya investasi yang dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya, peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Aceh. Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat meningkatkan minat calon investor. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh untuk diupayakan serta dijabarkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik dan keamanan. Dari pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah-satu penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di Aceh adalah karena masih adanya pemahaman yang tidak sama dari masyarakat akan arti pentingnya

investasi bagi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat; harga tanah yang tidak rasional; serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanaman modal tidak dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Provinsi Aceh. Faktor ini tidak dapat langsung dikendalikan oleh badan nasional/daerah bidang penanaman modal, oleh karena itu diperlukan koordinasi aktif dengan kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah di tingkat desa/kampung hingga dengan masyarakat luas secara berkesinambungan. Bahkan, peran masyarakat melalui partai politik nasional dan lokal di Aceh menjadi begitu penting pasca MoU Helsinki yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hal yang menjadi faktor utama bagi kegiatan penanaman modal adalah kebijakan pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon-calon penanam modal baru perlu terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman negara lain.

Demikian juga terhadap tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, perlu terus disediakan oleh pemerintah. Koordinasi yang intensif dengan instansi teknis terkait untuk sinkronisasi perencanaan infrastruktur dengan kebutuhan penanaman modal juga perlu ditingkatkan agar sarana dan prasarana ke sentra-sentra produksi dapat terpenuhi.

Sebagaimana telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, berbagai investasi di Aceh perlu didorong untuk terus berkembang, baik investasi berfasilitas, investasi non-fasilitas, investasi rumah tangga, maupun investasi pemerintah. Investasi pihak swasta perlu ditumbuhkembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara beriringan agar kegiatan penanaman modal di Aceh dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan terbentuknya pemerintahan yang lebih otonom, maka Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan Penanaman Modal secara makro; mengidentifikasi potensi unggulan daerah; melakukan kegiatan promosi investasi; menyusun regulasi perizinan penanaman modal; sekaligus melakukan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal.

Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Aceh, perlu dibuat suatu acuan tahunan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perwujudan Rencana Kerja tahun 2021 ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggung jawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas dari aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.1.1. Pengertian Renja**

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPA sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPA kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Gubernur Aceh No. 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPA menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPA pada tahun anggaran berkenaan.

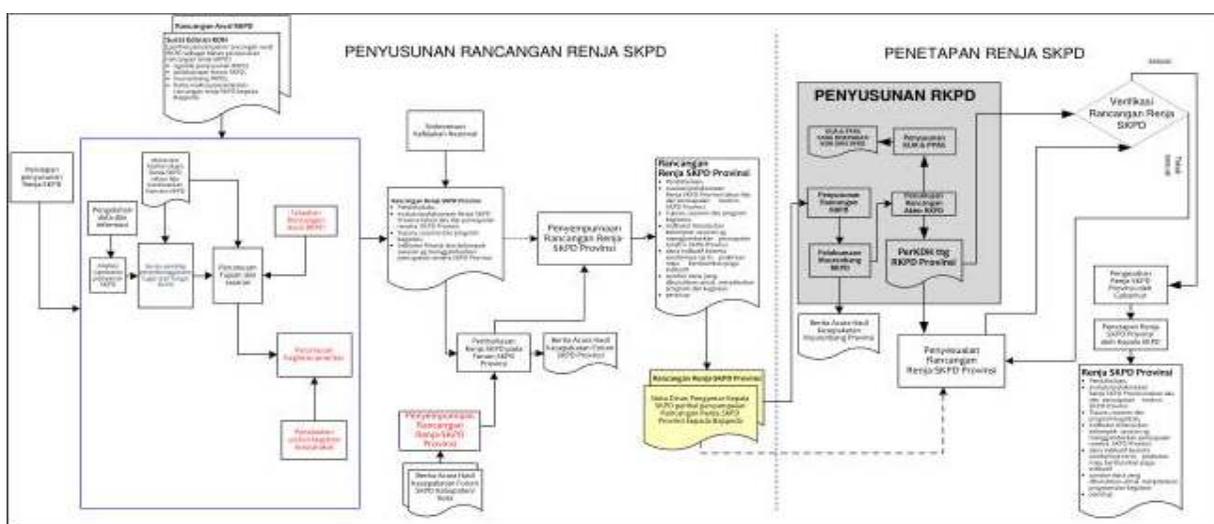
### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPA, evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPA. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPA dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPA menetapkan Renja SKPA untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPA pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja SKPA merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPA yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja SKPA merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPA yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPA setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPA Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja
  - Orientasi mengenai Renja
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
  - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang

lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

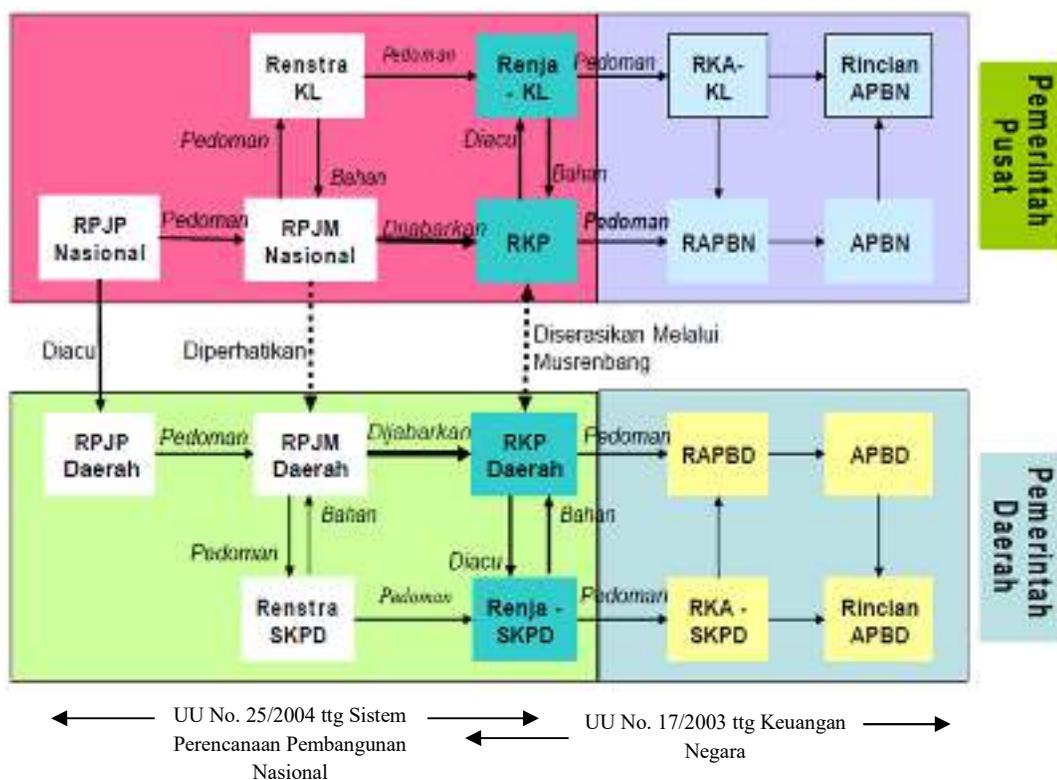
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan SKPA;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu berdasarkan Renstra SKPA;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA;
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPA;
- Penyempurnaan rancangan kerja SKPA;
- Pembahasan forum SKPA; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPA sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

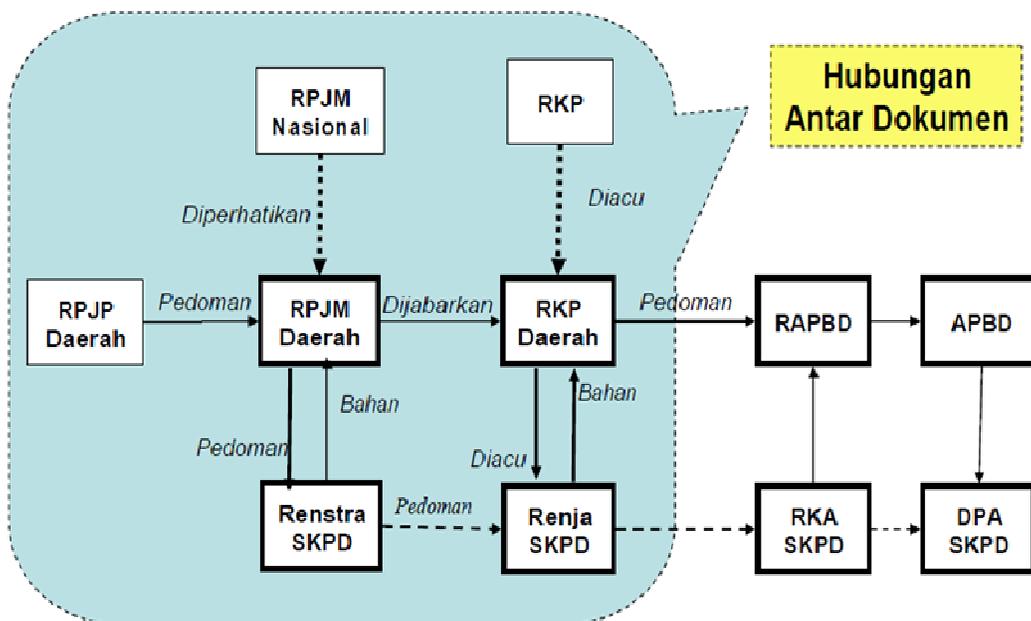
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023;
23. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
25. Qanun Aceh No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
26. Peraturan Gubernur Aceh No. 02 tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Penanaman Modal di Aceh;

27. Peraturan Gubernur Aceh No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
28. Peraturan Gubernur Aceh No. 97 tahun 2014 tentang Kawasan Perhatian Investasi Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan berbasis e-rencana;
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberi arah pengembangan investasi pada tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.
2. Acuan bagi seluruh stakeholder penanaman modal dalam memadukan kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Aceh.
3. Pertimbangan bagi Pemerintah Aceh dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja.
- Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (tabel terlampir), Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh; Review

terhadap Rancangan Awal RKPA (tabel terlampir); dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (tabel terlampir) dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mengenai Program dan Kegiatan rutin dan spesifikasi bidang penanaman modal.
- Bab V : Penutup.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TAHUN 2019

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2021-2=2019) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan;
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

##### b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
  - Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
  - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang telah tertuang dalam RPJMA 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022. Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut (terlampir).

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai berikut :

### a. Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Nilai Investasi;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima

### b. Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Investor Berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA);
2. Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA);
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA);
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Perizinan

### c. Formulasi/ Cara pengukuran :

1. Perolehan izin penanaman modal yang dikeluarkan/diterbitkan bidang pelayanan perizinan PMDN dan BKPM untuk PMA;
2. Nilai hasil pelaporan LKPM yang disampaikan perusahaan;
3. Perkiraan jumlah tenaga kerja per perusahaan;
4. Nilai Realisasi berjalan (n) – Nilai Realisasi tahun sebelumnya (n-1);
5. Survey yang dilaksanakan melalui pemberian questioner kepada penerima layanan.

**d. Penjelasan :**

1. Meningkatkan investasi yang tercermin pada jumlah permohonan investasi;
2. Memenuhi target realisasi penanaman modal yang telah ditentukan BKPM RI;
3. Penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Aceh;
4. Memenuhi UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal;
5. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal.

**e. Sumber Data :**

BKPM, Bidang Pelayan Perizinan DPMPTSP Aceh, DPMPTSP Kab/Kota dan LKPM.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya Penanaman modal;
2. Kualitas Data;
3. Kompetensi SDM;
4. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
5. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
6. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
8. Standar Pelayanan pengawasan, pelayanan dan pembinaan;
9. Pemberitaan media terkait informasi pelayanan penanaman modal kurang tepat;

**2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional**

Secara Umum, Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan Kabupaten/kota tidak jauh berbeda walaupun di beberapa nomenklatur terdapat perbedaan, namun maksud dan tujuannya sama, seperti

kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur kegiatan terkait hal tersebut adalah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Secara vertikal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, karena diantara indikator Program BKPM-RI yang bersinergi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Dinas Penanaman Modal memiliki 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, program peningkatan Pelayanan Perizinan dan program perencanaan pembangunan ekonomi, sedangkan di BKPM-RI Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan indikator realisasi penanaman modal, rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa, rasio realisasi PMDN, hasil survey lembaga pemeringkat Internasional tentang peringkat kemudahan berusaha dan daya saing penanaman modal.

### **2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, terdapat beberapa tantangan yang dijabarkan pada saat seminar atau pertemuan-pertemuan dengan *stakeholder* atau calon-calon penanam modal. Tantangan merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/ organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Kepastian hukum belum terwujud akibat masih adanya regulasi yang tidak selaras, baik di tingkat nasional maupun daerah;
2. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal;
3. Kualitas SDM dan keterampilan kerja masih kurang dimiliki oleh tenaga kerja lokal;
4. Status dan peruntukan lahan masih susah didapatkan serta sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat;
5. Dukungan masyarakat, perbankan dan pemerintah daerah yang masih kurang;
6. Penempatan sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal;
7. Tingkat kesadaran dan kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masih kurang, sehingga berakibat dari rendahnya nilai realisasi investasi di Provinsi Aceh;

### **2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program**

Visi dan misi Pemerintah Aceh ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Prioritas Pembangunan Aceh 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019	Prioritas Pembangunan Aceh 2017-2022
1. Ekonomi;	1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Lingkungan;	2. Pembangunan kedaulatan pangan
3. Politik;	3. Memperkecil disparitas antar wilayah
4. Penegakan hukum;	4. Pembangunan industri dan pariwisata
5. Tata kelola dan reformasi birokrasi;	5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pariwisata
6. Pertahanan dan keamanan;	6. Peningkatan pelayanan kesehatan
7. Kesejahteraan rakyat;	7. Pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan
8. Pembangunan kewilayahan;	8. Dinul Islam
9. Pembangunan ekonomi maritime dan kelautan;	9. Penataan reformasi birokrasi
	10. Penguatan perdamaian

***Tabel 1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Aceh.***

Walaupun RPJM Aceh Tahun 2017-2022 tidak menyebutkan secara eksplisit bidang penanaman modal sebagaimana yang ada dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019; namun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai koordinator bidang penanaman modal di Aceh memandang semua prioritas di atas sebagai satu kesatuan dalam memajukan Aceh, terutama melalui investasi di berbagai bidang. Karena itu, fungsi koordinasi SKPA ini sangat penting dioptimalkan dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi lintas sektoral untuk kemajuan Aceh.

Pengembangan bidang penanaman modal di Aceh tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas. Dari sebelas prioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2019, iklim investasi dan iklim usaha merupakan salah-satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk peningkatan realisasi investasi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah-satu panduan dalam menyusun program dan kegiatan bidang penanaman modal di Aceh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut secara langsung memberi kontribusi dalam mendukung program-program BKPM di Aceh, seperti dukungan pada kegiatan-kegiatan promosi, kerjasama regional dan kegiatan perbantuan untuk meningkatkan pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselaraskan dengan Rencana Strategis BKPM yang diwujudkan dengan merancang Rencana Kerja yang memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang serasi dengan mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

#### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan DPMPTSP Aceh**

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Kondisi keamanan yang semakin baik di Aceh;
2. Penambahan alokasi anggaran setiap tahun;
3. Perencanaan pembangunan jalan highway lintas Sumatera;
4. Perencanaan pembangunan pembangkit listrik berdasarkan potensi alam Aceh;
5. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN;

6. Kesempatan kerjasama luar negeri yang semakin terbuka dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 11 tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
7. Berlakunya visa on arrival di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda;
8. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha.

Dari tantangan dan peluang yang dikemukakan di atas, dapat ditentukan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu

1. Belum lengkapnya detail informasi potensi, peluang dan proyek investasi yang dipromosikan kepada investor misalnya ketersediaan lahan yang sudah clean and clear.
2. Belum optimal pemantauan, pengawasan, dan advokasi penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal.
3. Belum optimal perencanaan penanaman modal yang meliputi berbagai sektor terkait.

### **2.3.5 Formulasi Isu – Isu Penting**

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian daerah. Keberadaan rencana penanaman modal berjangka panjang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan banyak aspek penanaman modal, diantaranya identifikasi masalah yang dirasakan publik, visi, misi, sasaran dan strategi. Pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam menetapkan rencana umum penanaman modal (RUPM).

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yaitu:

1. Belum berfungsinya kawasan industri terpadu berbasis komoditas lokal
2. Belum lengkapnya detail informasi potensi, peluang dan proyek investasi yang dipromosikan kepada investor misalnya ketersediaan lahan yang sudah clean and clear
3. Terbatasnya energi listrik
4. Belum optimalnya pemantauan, pengawasan dan advokasi penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA**

### **2.4.1 Rancangan Awal RKPA dengan Analisis Kebutuhan**

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

#### **2.4.2 Uraian Tentang Alasan Perbandingan Tersebut Dilaksanakan**

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

#### **2.4.3 Rancangan Awal RKPA Rumusan Program dan Kegiatan**

Rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, MELIPUTI KEGIATAN:
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
    - Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
    - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - c. Administrasi Umum
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    - Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
  - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
  - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

#### **2.4.4 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun yang di Rencanakan (Tabel T-C.31)**

Tabel T-C 3.1 (terlampir) memperlihatkan kondisi awal RKPA dan analisis kebutuhan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam bidang penanaman modal.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

#### **2.5.1 Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kab/Kota)**

Uraian proses pengusulan oleh pemangku kepentingan tidak ada karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tidak ada anggaran yang bersifat bantuan dan dana otonomi khusus.

#### **2.5.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Perangkat Daerah**

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat luas menaruh harapan agar bidang penanaman modal di Aceh membaik dan semakin maju di masa mendatang. Mereka mengharapkan agar informasi potensi sektor unggulan, kemudahan perizinan, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merencanakan berbagai kegiatan misi investasi dalam dan luar negeri, kegiatan promosi dan pertemuan dengan calon investor, serta kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan realisasi investasi.

#### **2.5.3 Tabel Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Tabel T-C. 32)**

Tabel T-C 3.2 (terlampir) menampilkan usulan program dan kegiatan dari para *stakeholder* yang ditampung dalam anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

##### 3.1.1 Uraian Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Aceh 2017-2022 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022. Visi yang dimaksud berbunyi: **“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”**. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program semua SKPA sehingga dapat mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada untuk memperoleh manfaat (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang dicita-citakan.

Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 adalah:

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan itikat ahlussunnah waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh**

#### **3.2.1 Uraian Tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dan kualitas promosi serta kualitas pelayanan penanaman modal.
2. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan bidang penanaman modal.

Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Meningkatnya jumlah penanam modal.
2. Meningkatnya realisasi investasi.
3. Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

##### 4.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan tahun anggaran 2021 adalah :

- a. Sebagai upaya mendukung pencapaian Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam melaksanakan tugas urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai upaya merealisasikan target Program Nasional terkait dengan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan dan Non perizinan termasuk lintas Kabupaten/Kota.

##### 4.1.2 Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan

Untuk tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merencanakan 2 (dua) program utama dan 1 (satu) kegiatan prioritas dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja SKPA ini pada tahun Pertama RPJM Aceh Tahun 2017-2022 dapat memberi manfaat bagi perbaikan citra Aceh sebagai salah-satu daerah tujuan investasi di Indonesia. Diharapkan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2021.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terdiri dari program dan kegiatan rutin dan spesifik bidang penanaman modal.

Adapun program dan kegiatan rutin adalah

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan dokumen perencanaan dengan beberapa sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu:

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan beberapa sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Administrasi Umum

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan beberapa sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu:

- Penyediaan jasa surat-menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sedangkan program dan kegiatan utama dan yang spesifik bidang penanaman modal adalah:

**1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diadakan dalam rangka menarik calon-calon penanam modal/investor untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dan insentif di bidang penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

## **2. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Promosi Penanaman Modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

## **3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan dan pemantauan penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

## **4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## **5. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengelola data dan sistem informasi penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

### **4.13 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Rencana dan Perkiraan Maju Rencana Tahun Selanjutnya**

Dapat dilihat pada Tabel 3.3 (terlampir).

## **4.2 Pendanaan**

Pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk satu tahun ke depan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), dimana alokasi penerimaan pembiayaan dikelompokkan pada sumber pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Aceh (PAA), umumnya dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan spesifik lembaga, Pembangunan Gedung Kantor dan untuk tambahan penghasilan PNS.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), sumber dana ini dialokasikan pada pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan kegiatan rutin administrasi perkantoran lainnya.
- c. Dana (DBH) bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, sumber dana ini dialokasikan untuk kegiatan spesifik lembaga.
- d. Dana Migas Aceh dialokasikan untuk kegiatan spesifik lembaga terkait dengan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja ini tidak saja menjadi panduan dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2021 di bidang penanaman modal, tapi juga menjadi patokan bagi keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2020 yang sedang dilaksanakan. Benang merah antara kinerja tahun berjalan dengan tahun berikutnya patut diperhatikan agar keberlanjutan (*sustainability*) pencapaian misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dapat terus berlangsung secara efektif dan efisien hingga akhir RPJM Aceh Tahun 2017-2022.

#### **5.2 Catatan Penting**

Keterkaitan kinerja antar-tahun anggaran dapat dilihat melalui laporan kinerja akhir tahun. Karena itu, Rencana Kerja ini dapat menjadi salah-satu alat evaluasi terhadap target dan realisasi kerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal yang sangat penting adalah bahwa dunia usaha dan masyarakat luas dapat terus memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh guna peningkatan nilai realisasi investasi Aceh. Diharapkan agar keluaran (*output*) Rencana Kerja pada tahun Pertama RPJM Aceh Tahun 2017-2022 ini memberi manfaat nyata (*outcome*) bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa mendatang.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021 melalui koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2021. RKA yang telah disetujui oleh TAPA dan DPRA dalam pembahasan RAPBA akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai penjabaran dari APBA Aceh tahun 2021.

Banda Aceh, Agustus 2020  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19721018 199203 1 002

**Formulir E.29**  
**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan**  
**Renja Perangkat Daerah**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi	√	-	-	-
2	Penyiapan data dan informasi	√	-	-	-
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-	-	-
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi	√	-	-	-
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah provinsi	√	-	-	-
6	Penelaahan rancangan awal RKPd provinsi	√	-	-	-
7	Perumusan Tujuan dan Sasaran	√	-	-	-
8	Penelaahan Usulan Masyarakat	-	-	-	-
9	Perumusan Kegiatan Prioritas	√	-	-	-
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Provinsi	√	-	-	-
10.	Menyelaraskan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan Usulan Program dan Kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota	-	-	-	-
10.	Mempertajam Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi	√	-	-	-
10.	Mensinkronkan Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka Optimalisasi Pencapaian sasaran sesuai dengan Kewenangan dan sinergitas Pelaksana	√	-	-	-
10.	Menyesuaikan pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas berdasarkan Pagu Indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sesuai surat Edaran Gubernur	√	-	-	-
11	Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja, Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	√	-	-	-
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Provinsi	√	-	-	-
13	Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Pagu Indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi telah Menyusun dan Memperhitungkan Prakiraan Maju	√	-	-	-
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disahkan	√	-	-	-

Note;  
Berilah tanda Centang (√)

Mengetahui,

Kepala Bidang Bappeda

( )

Banda Aceh, Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19721018 199203 1 002



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan						
						Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						6			7		8=(7/6*100)					
2						4			9		10=(5+7+9)					
3						5			9		11=(10/4)					
1	02	12	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	2.351.015.208	12 Bulan 474.532.000	12 Bulan 577.827.408	12 Bulan 481.335.000	83,30%	12 Bulan 1.029.219.808	36 Bulan 1.985.086.808	84,44%
1	02	12	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/tersedianya surat kabar dan majalah	60 bulan	146.870.000	12 Bulan 25.592.600	12 Bulan 26.688.000	12 Bulan 21.040.000	78,84%	12 Bulan 37.920.000	36 Bulan 84.552.600	57,57%
1	02	12	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/terlayaninya kaebutuhan makan dan minuman rapat koordinasi dan tamu	60 bulan	649.510.000	12 Bulan 42.346.000	12 Bulan 88.080.000	12 Bulan 44.120.000	50,09%	12 Bulan 118.750.000	36 Bulan 205.216.000	31,60%
1	02	12	01	01	018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/tersedianya perangkko,materai dan paket pengiriman	60 bulan	1.763.620.000	12 Bulan 237.346.379	12 Bulan 185.900.000	12 Bulan 178.419.217	95,98%	12 Bulan 99.029.000	36 Bulan 514.794.596	29,19%
1	02	12	01	01	022	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran/mengikuti rapat koordinasi dalam dan luar daerah	60 bulan	9.256.179.725	12 Bulan 1.569.484.500	12 Bulan 1.909.341.050	12 Bulan 1.714.777.200	89,81%	12 Bulan 1.906.562.050	36 Bulan 5.190.823.750	56,08%
1	02	12	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>42.088.167.861</b>	<b>1.244.349.493</b>	<b>24.682.194.066</b>	<b>24.133.762.484</b>		<b>13.196.819.162</b>	<b>38.574.931.139</b>	
1	02	12	01	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	48 Bulan	29.124.000.000	0 0	12 Bulan 23.776.528.000	12 Bulan 23.496.798.000	98,82%	12 Bulan 10.004.131.787	12 bulan 33.500.929.787	115,03%
1	02	12	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60 bulan	2.975.905.365	0 0	0 0	0 0	0,00%	12 Bulan 2.975.905.365	36 Bulan 2.975.905.365	100,00%
1	02	12	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/pemeliharaan mobil dinas dan kendaraan roda 2 serta pajak kendaraan	60 bulan	2.658.845.380	12 Bulan 411.403.775	12 Bulan 506.861.345	12 Bulan 423.558.484	83,56%	12 Bulan 199.372.010	36 Bulan 1.034.334.269	38,90%
1	02	12	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/peralatan gedung kantor	60 bulan	2.097.299.000	12 Bulan 804.425.718	12 Bulan 375.924.750	12 Bulan 190.528.000	50,68%	12 Bulan 17.410.000	36 Bulan 1.012.363.718	48,27%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan												
							Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1							4		5			6		7		8=(7/6*100)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	02	12	01	02	033		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/terpeliharanya taman perkantoran	60 bulan	156.879.942	12 Bulan	28.520.000	12 Bulan	22.879.971	12 Bulan	22.878.000	99,99%	12 Bulan	0	36 Bulan	51.398.000	32,76%	
1	02	12	01	02	042		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	12 bulan	5.075.238.174	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	12 bulan	0	0,00%	
1	02	12	01	03			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>1.184.196.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.446.140</b>	<b>382.196.140</b>				<b>123.243.780</b>	<b>505.439.920</b>				
1	02	12	01	03	002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur/Tersedianya Pakaian Dinas	48 Bulan	1.184.196.140	0	0	12 Bulan	392.446.140	12 Bulan	382.196.140	97,39%	12 Bulan	123.243.780	12 Bulan	505.439.920	42,68%	
1	02	12	01	05			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>			<b>2.780.780.000</b>	<b>120.672.037</b>	<b>407.000.000</b>	<b>173.618.170</b>					<b>23.000.000</b>	<b>317.290.207</b>				
1	02	12	01	05	001		Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturKeikutsertaan pada pelatihan, Bimtek dan kursus-kursus singkat	60 bulan	2.780.780.000	12 Bulan	120.672.037	12 Bulan	407.000.000	12 Bulan	173.618.170	42,66%	12 Bulan	23.000.000	36 Bulan	317.290.207	11,41%	
1	02	12	01	15			<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi</b>			<b>7.602.870.123</b>	<b>3.206.943.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>3.206.943.775</b>				
1	02	12	01	15	007		Pengawasan dan Evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Terwujudnya peningkatan minat investasi yang tercermn pada jumlah permohonan izin investasi/rakor sinkronisasi arah kebijakan dan target realisasi penanaman modal dan perizinan	12 bulan	280.379.000	12 Bulan	245.414.366	0	0	0	0	0,00%	0	0	12 Bulan	245.414.366	87,53%	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan												
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
1	02	12	01	15	008	peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terwujudnya peningkatan minat investasi yang tercermn pada jumlah permohonan izin investasi/pembinaan dan pengawasan investasi di daerah	24 Bulan	965.729.200	24 Bulan	384.700.255	0	0	0	0	0,00%	0	0	24 Bulan	384.700.255	39,84%
1	02	12	01	15	018	peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah	Terwujudnya peningkatan minat investasi yang tercermn pada jumlah permohonan izin investasi/terlaksananya kegiatan RIF	24 Bulan	6.356.761.923	12 Bulan	2.576.829.154	0	0	0	0	0,00%	0	0	24 Bulan	2.576.829.154	40,54%
1	02	12	01	16		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>			<b>23.359.083.113</b>		<b>487.548.000</b>		<b>9.446.524.190</b>		<b>7.761.644.666</b>			<b>3.124.646.121</b>		<b>11.378.022.501</b>	
1	02	12	01	16	004	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	peningkatan informasi prosedur, regulasi dan perizinan investasi kepada masyarakat /terlaksananya sosialisasi /bimtek sistem informasi potensi investasi daerah(SIPID)	60 bulan	2.439.149.687	12 bulan	487.548.000	12 bulan	743.699.700	12 bulan	655.359.705	88,12%	12 bulan	249.999.975	36 bulan	1.392.907.680	57,11%
1	02	12	01	16	018	Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian Serta Evaluasi	Peningkatan Informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan/tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	48 bulan	1.337.495.000	0	0	12 bulan	329.165.000	12 bulan	318.457.600	96,75%	12 bulan	11.550.000	12 Bulan	330.007.600	24,67%
1	02	12	01	16	020	peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terwujudnya peningkatan minat investasi yang tercermn pada jumlah permohonan izin investasi/pembinaan dan pengawasan investasi di daerah	36 bulan	965.729.200	0	0	12 bulan	625.749.450	12 bulan	544.632.650	87,04%	12 bulan	24.999.800	12 Bulan	625.749.450	64,80%
1	02	12	01	16	021	peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah	Terwujudnya peningkatan minat investasi yang tercermn pada jumlah permohonan izin investasi/terlaksananya kegiatan RIF	36 bulan	6.356.761.923	0	0	12 bulan	4.611.611.800	12 bulan	3.616.378.752	78,42%	12 bulan	1.549.696.334	12 bln	5.114.141.800	80,45%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan												
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
1	02	12	01	16	022	Peningkatan Iklim Penanaman Modal	Terwujudnya Peningkatan Iklim Penanaman Modal/Terlaksananya kemitraan UMKM dgn Perusahaan PMA/PMDN, Terlaksananya Forum Pelaku Usaha dan sosialisasi qanun	36 bulan	2.510.982.125	0	0	12 bulan	622.345.500	12 bulan	341.398.624	54,86%	12 bulan	0	12 Bulan	341.398.624	13,60%
1	02	12	01	16	024	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	Terwujudnya Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	24 Bulan	9.748.965.178	0	0	12 bulan	2.513.952.740	12 bulan	2.285.417.335	90,91%	12 bulan	1.288.400.012	12 Bulan	3.573.817.347	36,66%
1	02	12	01	16	025	Pemberdayaan Usaha	Terlaksananya Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD	24 Bulan	310.512.095	0	0	0	0	0	0	0,00%	12 bulan	35.704.000	12 Bulan	35.704.000	11,50%
1	02	12	01	16	026	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Meningkatnya Pengetahuan Informasi Regulasi	24 Bulan	310.545.763	0	0	0	0	0	0	0,00%	12 bulan	88.555.140	12 Bulan	88.555.140	28,52%
1	02	12	01	18		<b>Program Perencanaan pengembangan ekonomi</b>			<b>7.858.397.658</b>		<b>4.040.369.678</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>225.720.148</b>		<b>4.266.089.826</b>	<b>54,29%</b>
1	02	12	01	18	001	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah	Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi bidang penanaman modal	24 Bulan	7.858.397.658	12 Bulan	4.040.369.678	0	0	0	0	0,00%	0	225.720.148	24 Bulan	4.266.089.826	54,29%
1	02	12	01	19		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik/Perizinan</b>			<b>1.812.529.440</b>		<b>1.528.770.448</b>		<b>2.314.054.200</b>		<b>2.156.314.491</b>			<b>994.826.662</b>		<b>4.679.911.601</b>	<b>258,20%</b>

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan												
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
1	02	12	01	19	003	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/jumlah penyelesaian kasus	60 bulan	91.250.000	12 bulan	80.604.800	12 bulan	230.950.000	12 bulan	188.414.260	81,58%	12 bulan	53.859.350	36 bulan	322.878.410	353,84%
1	02	12	01	19	004	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	12 bulan	205.540.000	12 bulan	0	0	0	0	0,00%	0	0	12 bulan	0	0,00%	
1	02	12	01	19	007	Pengendalian dan Pengembangan Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/ tersosialisasi nya revisi SOP dan SP pelayanan perizinan dan non perizinan	60 bulan	145.735.000	12 bulan	121.499.500	0	0	0	0,00%	12 bulan	95.081.403,00	36 bulan	216.580.903	148,61%	
1	02	12	01	19	010	Monitoring dan Evaluasi perizinan dan non perizinan ke kabupaten/kota	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/terlaksananya monitoring pelayanan perizinan dan non perizinan se kab/kota	60 bulan	155.075.000	12 bulan	139.843.830	12 bulan	155.074.750	12 bulan	152.756.214	98,50%	12 bulan	48.201.000	36 bulan	340.801.044	219,77%
1	02	12	01	19	011	Sosialisasi dan pembinaan perizinan dan Non perizinan kabupaten/kota	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/terlaksananya pembinaan PTSP kab/kota	60 bulan	41.349.440	12 bulan	38.696.115	12 bulan	206.799.450	12 bulan	164.999.500	79,79%	12 bulan	0	36 bulan	203.695.615	492,62%
1	02	12	01	19	012/021	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/tersusunnya buku laporan survey kepuasan masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan	60 bulan	38.000.000	12 bulan	94.600.000	12 bulan	98.000.000	12 bulan	96.360.000	98,33%	12 bulan	49.000.000	36 bulan	239.960.000	631,47%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					6	7	8=(7/6*100)		9	10=(5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 02 12 01 19 013	Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/ jumlah aparatur perizinan dan non perizinan sub bidang kelautan dan perikanan yang terbimbing	48 bulan 32.310.000	12 bulan 19.560.000	12 bulan 82.960.000	12 bulan 66.890.100	80,63%	12 bulan 0	36 bulan 86.450.100	267,56%
1 02 12 01 19 015	Rapat Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/terselenggaranya pertemuan forum komunikasi PTSP kab/kota se provinsi aceh	60 bulan 33.510.000	12 bulan 28.154.500	12 bulan 123.380.000	12 bulan 115.509.588	93,62%	12 bulan 0	36 bulan 143.664.088	428,72%
1 02 12 01 19 017	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A	60 bulan 346.425.000	12 bulan 327.497.773	12 bulan 593.705.000	12 bulan 588.523.072	99,13%	12 bulan 249.873.303	36 bulan 1.165.894.148	336,55%
1 02 12 01 19 018/022	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C	60 bulan 408.325.000	12 bulan 399.559.818	12 bulan 365.125.000	12 bulan 342.149.200	93,71%	12 bulan 249.702.303	36 bulan 991.411.321	242,80%
1 02 12 01 19 019	Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/ jumlah aparatur perizinan dan non perizinan sub bidang B	12 bulan 33.110.000	12 bulan 0	0 0	0 0	0,00%	0 0	0	0,00%
1 02 12 01 19 020	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan/Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di bidang B	60 bulan 281.900.000	12 bulan 278.754.112	12 bulan 458.060.000	12 bulan 440.712.557	96,21%	12 bulan 249.109.303	36 bulan 968.575.972	343,59%
1 02 12 01 22	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>		<b>7.895.037.358</b>	<b>574.067.120</b>	<b>387.539.700</b>	<b>348.346.972</b>		<b>225.720.148</b>	<b>1.148.134.240</b>	<b>14,54%</b>

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan													
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1						4		5			6		7		8=(7/6*100)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	02	12	01	22	035	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah	Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi bidang penanaman modal	36 bulan	7.895.037.358	0	574.067.120	12 bulan	387.539.700	12 bulan	348.346.972	89,89%	12 bulan	225.720.148	36 bulan	1.148.134.240	14,54%	

Banda Aceh, Agustus 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 199203 1 002

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Aceh**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	SPM (Standar Pelayanan Minimum)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah nilai realisasi investasi.		Jumlah nilai realisasi investasi.	5.000.000.000.000 rupiah	5.500.000.000.000 rupiah	6.050.000.000.000 rupiah	6.650.000.000.000 rupiah	7.300.000.000.000 rupiah	5.812.090.744.108 rupiah	4.953.957.949.861 rupiah	6.650.000.000.000 rupiah	7.300.000.000.000 rupiah		
3	Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM.		Jumlah penanam modal asing / dalam negeri.	559 perusahaan	670 perusahaan	805 perusahaan	965 perusahaan	1.159 perusahaan	446 perusahaan	808 perusahaan	965 perusahaan	1.159 perusahaan		
4	Rasio daya serap tenaga kerja.		Rasio daya serap tenaga kerja.	1:60	1:65	1:70	1:75	1:80	1:29	0	1:75	1:80		
5	Jumlah peserta dan aparaturnya Sosialisasi sistem informasi dan potensi daerah			64 orang	64 orang	- orang	24 orang	24 orang	64 orang	0 orang	24 orang	24 orang		
6	jumlah peserta Sosialisasi e-perizinan Kab/Kota, sinkronisasi data penanaman modal dan database terintegrasi Kab/kota serta workshop multi media			75 orang	150 orang	70 orang	70 orang	70 orang	77 orang	0 orang	70 orang	70 orang		
7	Jumlah peserta Kursus, Pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kursus-kursus singkat			24 orang	36 orang	0 orang	24 orang	24 orang	24 orang	2 orang	24 orang	24 orang		
8	Frekuensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Renja dan laporan lakip			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %		
9	Koordinasi, Konsultasi, Supervisi Perencanaan Penganggaran dan Musrenbangnas			0 kali	15 kali	6 kali	6 kali	6 kali	13 kali	0 kali	14 kali	14 kali		
6	Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	1 (satu) kali /tahun		1 kali	0 kali	0 kali	1 kali							
7	Frekuensi pemantauan perusahaan penanaman modal.			16 kali	25 kali	38 kali	38 kali	38 kali	16 kali	0 kali	58 kali	58 kali		
8	Frekuensi pengawasan perusahaan penanaman modal.			12 kali	19 kali	34 kali	34 kali	34 kali	12 kali	0 kali	44 kali	44 kali		
9	Frekuensi pembinaan perusahaan penanaman modal.			16 kali	28 kali	28 kali	28 kali	28 kali	16 kali	0 kali	45 kali	45 kali		
10	Frekuensi fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan penanaman modal.			1 kali	4 kali	5 kali	5 kali	5 kali	1 kali	0 kali	2 kali	2 kali		
11	Frekuensi publikasi informasi Media cetak serta terkait LKPM.			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0 kali	4 kali	4 kali		
12	Jumlah kegiatan promosi investasi.			9 kali	7 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	0 kali	11 kali	11 kali		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	SPM (Standar Pelayan Minimum)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Misi Investasi/Kerjasama kawasan			5 Kali	0 Kali	9 kali	9 kali	9 kali	5 Kali	2 Kali	9 kali	9 kali		
14	Jumlah buku Aceh Invesment			800 buah	1.500 buah	2.000 buah	2.000 buah	2.000 buah	800 buah	0 buah	2.000 buah	2.000 buah		
15	Jumlah leaflet Investasi.			900 lembar	2.000 lembar	2.000 lembar	2.000 lembar	2.000 lembar	900 lembar	0 lembar	2.000 lembar	2.000 lembar		
16	Publikasi baliho investasi			50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	0 buah	50 buah	50 buah		
17	Jumlah Goodle Bag			1.000 buah	2.000 buah	2.000 buah	2.000 buah	2.000 buah	1.000 buah	0 buah	2.000 buah	2.000 buah		
18	Publikasi video promosi investasi dan video presentasi sosialisasi kemudahan berusaha			0 Paket	2 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 Paket	0 Paket	1 paket	1 paket		
21	Jumlah buku regulasi penanaman modal.			70 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	70 buah	0 buah	85 buah	85 buah		
22	Jumlah buku Dokumen Perencanaan			50 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	50 buah	0 buah	0 buah	0 buah		
23	Jumlah Qanun Penanaman Modal			1 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	1 buah	0 buah	0 buah	0 buah		
24	Jumlah Buku Direktori UMKM Potensial Aceh			70 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	70 buah	0 buah	0 buah	0 buah		
25	Frekuensi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal Aceh.			1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali		
26	Jumlah peserta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal Aceh.			105 orang	0 orang	115 orang	115 orang	115 orang	105 orang	0 orang	115 orang	115 orang		
27	Jumlah peserta Rapat perencanaan pengembangan kawasan (KPBB, KEK, KI) di Aceh			0 orang	0 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0 orang	50 orang	50 orang		
28	Frekuensi fasilitas kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN, BUMD/BUMN			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali		
29	Jumlah peserta fasilitas kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN, BUMD/BUMN			55 orang	53 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	0 orang	55 orang	55 orang		
30	Jumlah Peserta bisnis forum dan one on one meeting KEK arun lhokseumawe			150 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	150 orang	0 orang	0 orang	0 orang		
31	Jumlah peserta sosialisasi KEK Arun			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0 orang	100 orang	100 orang		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	SPM (Standar Pelayanan Minimum)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	Jumlah peserta workshop administrator KEK			0 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	0 orang	0 orang	40 orang	40 orang		
33	Frekuensi Penanganan kasus kab/kota			5 Kasus	8 Kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	5 Kasus	0 Kasus	4 kasus	4 kasus		
34	Bimtek pengendalian dan pengembangan manajemen pelayanan terpadu satu pintu dan bimtek front office			30 orang	50 orang	0 kali	0 kali	0 kali	30 orang	0 orang	0 kali	0 kali		
35	Monotoring untuk meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan Kab/Kota			24 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	24 orang	0 orang	39 orang	39 orang		
36	Frekuensi pembinaan PTSP Kab/Kota			10 Kab/Kota	20 Kab/kota	20 kab/kota	20 Kab/kota	20 kab/kota	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	20 kab/kota	20 Kab/kota		
37	Jumlah judul buku survey kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan			2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	0 buku	2 buku	2 buku		
38	Jumlah Aparatur perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan yang terbimbing			30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang		
39	Jumlah peserta pertemuan forum komunikasi PTSP Kab/Kota			30 orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	30 orang	0 orang	60 orang	60 orang		
40	Jumlah izin dan non izin bidang A	350 Izin/non izin		350 izin/non izin	350 izin/non izin	450 izin/non izin	450 izin/non izin	450 izin/non izin	765 izin/non izin	350 izin/non izin	450 izin/non izin	450 izin/non izin		
41	Jumlah izin dan non izin bidang C	350 Izin/non izin		3.005 izin/non izin	3.005 izin/non izin	350 izin/non izin	350 izin/non izin	350 izin/non izin	2.973 izin/non izin	1.200 izin/non izin	350 izin/non izin	350 izin/non izin		
42	Jumlah peserta aparaturnya perizinan dan non perizinan sub bidang ESDM			30 orang	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	0 orang	0 orang	30 orang		
43	Jumlah peserta sosialisasi sektor pertambangan			0 orang	0 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0 orang	50 orang	50 orang		
44	Jumlah izin dan non izin bidang B	310 Izin/non izin		310 izin/non izin	350 izin/non izin	650 izin/non izin	650 izin/non izin	650 izin/non izin	665 izin/non izin	365 izin/non izin	650 izin/non izin	650 izin/non izin		
45	Jumlah pusat data dan informasi investasi.	1 (satu) buah		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		
46	Jumlah website.	1 (satu) buah		1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah		

Banda Aceh, Agustus 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 199203 1 002

Tabel T-C. 31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPA TAHUN 2021  
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>							
	<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
	2.18.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.955.000	
	2.18.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersusunnya Renja, RKA, DPA serta Lakip DPMPTSP	4 Dokumen	68.125.000	4 Dokumen	78.343.750	
	2.18.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	5 Dokumen	8.775.000	5 Dokumen	10.091.250	
	2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi dan Monitoring ke Kab/Kota	16 Orang	151.032.000	16 Orang	173.686.800	
				b. Diklat/Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Luar Daerah	10 Orang		10 Orang		
	<b>2.18.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>							
	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Tersedianya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	17.918.370.825	14 Bulan	20.606.126.449	
				b. Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12 Bulan		12 Bulan		
				c. Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	12 Bulan		12 Bulan		
				d. Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	14 Bulan		14 Bulan		
	2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Terpenuhinya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62 Orang	2.327.231.768	62 Orang	2.676.316.533	
				b. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Bulan		12 Bulan		

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.18.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	1 Dokumen	120.782.500	1 Dokumen	138.899.975	
	2.18.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Tersedianya Buku Besar	24 Buku	26.092.600	24 Buku	30.006.490	
				b. Tersedianya Buku Registrasi SPM	24 Buku		24 Buku		
				c. Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Akhir Tahun	3 Buah		3 Buah		
	2.18.01.1.03	Administrasi Umum							
	2.18.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Tersedianya Belanja Paket/Pengiriman	12 Bulan	80.705.000	12 Bulan	92.810.750	
				b. Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan		12 Bulan		
	2.18.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Kawat Faksimili/Internet	12 Bulan	715.597.860	12 Bulan	822.937.539	
	2.18.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Penyediaan Jasa Cleaning Service DPMPSTSP Aceh	1 Paket	469.019.640	1 Paket	539.372.586	
				b. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	12 Bulan		12 Bulan		
				c. Tersedianya Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Keamanan Lingkungan	12 Bulan		12 Bulan		
	2.18.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	29.867.955	12 Bulan	343.481.488	
	2.18.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	301.574.729	12 Bulan	346.810.938	
	2.18.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan	28.342.985	12 Bulan	32.594.433	
	2.18.01.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Perangkat Komunikasi Konferensi Virtual	1 Paket	85.000.000	1 Paket	97.750.000	
				b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		12 Bulan		

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Tersedianya Sewa Gudang Kantor	12 Bulan		12 Bulan		
	2.18.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	37.920.000	12 Bulan	43.608.000	
	2.18.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	139.750.000	12 Bulan	160.712.500	
	2.18.01.1.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	438.114.000	12 Bulan	503.831.100	
	2.18.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Pemeliharaan Mobil Dinas dan Kendaraan Roda 2 serta Pajak Kendaraan	12 Bulan	864.404.440	12 Bulan	994.065.106	
	2.18.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	191.689.882	12 Bulan	220.443.364	
	2.18.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	2.18.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	162 Steel	128.785.800	162 Steel	148.103.670	
	2.18.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Bimtek dan Kursus-kursus	12 Bulan	23.381.800	12 Bulan	268.890.700	
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	a. Rekomendasi Perubahan Kebijakan Deregulasi Penanaman Modal	1 Laporan	298.694.000	1 Laporan	343.498.100	
				b. Terpetaknya Kondisi Kemudahan berusaha di Provinsi dan di seluruh Kab/Kota di Aceh	23 Kab/Kota		23 Kab/Kota		
				c. Tersusunnya Rancangan Awal Peraturan Deregulasi Penanaman Modal	1 Rancangan Peraturan		1 Rancangan Peraturan		
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							
	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a. Penyusunan Prospektus Investasi	1 Kajian	796.089.505	1 Kajian	915.502.931	

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN (Investor Pitching)	50 Orang		50 Orang		
				c. Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha dan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen		
				d. Terlaksananya Rapat Koordinasi Dialog Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Aceh	100 Orang		100 Orang		
				e. Terlaksananya Rapat-rapat Perencanaan Penanaman Modal	60 Orang		60 Orang		
<b>3</b>	<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>							
	<b>2.18.03.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi</b>							
	<b>2.18.03.1.01.01</b>	<b>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</b>	<b>Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	a. Tersedianya Materi promosi berupa buku Peluang Investasi Aceh dalam Bahasa Inggris dan Indonesia dan baliho Investasi yang menarik, informative, berisikan data dan informasi lengkap, valid dan terbaru;	Bahasa Indonesia 500 buku, Bahasa Inggris 500 buku	1.426.433.928	Bahasa Indonesia 500 buku, Bahasa Inggris 500 buku	<b>1.640.399.017</b>	
				b. Terlaksananya Workshop Materi promosi Daerah	1 kali		1 kali		
				c. Tersedia dan terveifikasinya Data dan Informasi Potensi, Peluang dan Proyek Investasi Daerah	23 Kab/Kota		23 Kab/Kota		
				d. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi penguatan Materi promosi dan kerjasama regional antar instansi teknis dan fasilitasi calon investor	20 kali Pertemuan		20 kali Pertemuan		
				e. Terlaksananya misi investasi di dalam negeri melalui Promosi Kawasan Khusus, Regional Investment Forum/RIF, Kerjasama Negara ASEAN dan IMT GT	2 kali		4 kali		

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				f. Terlaksananya Misi Investasi dan Promosi Luar Negeri melalui Kerjasama Integrated Promotion wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan IMT GT.	1 kali		2 kali		
	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a. Terkelolanya perangkat promosi digital (Website, Sosial Media dan CRM) yang responsive, informative, terbarukan, berkualitas dan berkelanjutan	1 paket	1.841.884.056	1 Paket	2.118.166.664	
				b. Terlaksananya Pameran Promosi Investasi Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri	1 Kali		1 Kali		
				c. Tersedianya alternative cara promosi era new normal melalui teleconference (tanpa tatap muka)	1 Paket		1 Paket		
				d. Terlaksananya Publikasi Promosi dan Investasi pada platform media digital, online & elektronik serta media cetak	1 paket, 40X tayang, 1 kali		1 paket, 40X tayang, 1 kali		
				e. Terlaksananya Aceh Investment Forum 2021 di Banda Aceh	1 kali		1 kali		
				f. Terlaksananya Misi Investasi Luar Negeri di Kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika dan Australia	1 kali		2 kali		
<b>4</b>	<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>							
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota							
	2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a. Terlaksananya Sosialisasi Masterlist Kawasan Ekonomi Khusus	40 Orang	999.999.499	40 Orang	1.149.999.424	
				b. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus	12 Izin		12 Izin		

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a. Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di Bidang A	450 Izin dan Non Izin	1.499.517.650	450 Izin dan Non Izin	1.724.445.298	
				b. Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di Bidang B	450 Izin dan Non Izin		450 Izin dan Non Izin		
				c. Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di Bidang C	30.000 Izin dan Non Izin		30.000 Izin dan Non Izin		
	2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a. Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Kasus	533.977.543	4 Kasus	614.074.174	
				b. Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan	20 Kab/Kota		20 Kab/Kota		
				c. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Nonperizinan ke Kab/Kota	75 Izin dan Non Izin		75 Izin dan Non Izin		
				d. Terlaksananya Rapat Kerja PTSP	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
				e. Tersusunya Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	2 Buku		2 Buku		
				f. Tersusunnya SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	2 Buku		2 Buku		
5	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>							
	2.18.05.1.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>							
	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	A. Pengadaan Aplikasi Sistem Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Paket	277.750.000	1 Paket	319.412.500	
				b. Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Perusahaan		30 Perusahaan		
				c. Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal (2016 - 2020)	1 Buku		1 Buku		
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	a. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	33 Perusahaan	248.950.000	33 Perusahaan	286.292.500	

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisa Kebutuhan		Catatan Penting
							Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Terlaksananya Publikasi Media Cetak/Surat Kabar	4 Kali		4 Kali		
				c. Terlaksananya Rapat Taskforce	4 Kali		4 Kali		
	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42 Perusahaan	187.200.000	42 Perusahaan	215.280.000	
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi							
	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a. Meningkatnya Penguatan Pemanfaatan serta Kapasitas Pendukung Sistem Informasi Penanaman Modal untuk Mengolah dan Menyajikan Data Perizinan dan Nonperizinan	1 Laporan	349.998.950	1 Laporan	402.498.793	
				b. Terlaksananya Administrasi Rutin pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Laporan		1 Laporan		
				c. Terlaksananya Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan		
				d. Terlaksananya Penyajian Data Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan		

Banda Aceh, Agustus 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19721018 199203 1 002

**TABEL T-C. 32**  
**USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tidak ada usulan program dan kegiatan	Nihil	-	-	-	-

Banda Aceh, Agustus 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Dr. Aulia Sofyan  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 199203 1 002

**Tabel T-C 3.3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jumlah Pagu Indikatif (2021): **33.096.006.715**  
 Jumlah Prakiraan Maju (2022): **38.060.407.722**

Nomor	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>2.18.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>24.635.511.584</b>	<b>28.330.838.321</b>			
<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>229.632.000</b>	<b>264.076.800</b>			
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Tersusunnya Renja	1 Dokumen	1.700.000	1.955.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
2.18.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Tersedianya Renja, RKA, DPA serta Lakip DPMPTSP	4 Dokumen	Tersusunnya Renja, RKA, DPA serta Lakip DPMPTSP	4 Dokumen	68.125.000	78.343.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
2.18.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	5 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	5 Dokumen	8.775.000	10.091.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi dan Monitoring ke Kab/Kota, Diklat/Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Luar Daerah	10 Orang, 16 Orang	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12 Bulan	151.032.000	173.686.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>2.18.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>										<b>20.392.477.693</b>	<b>23.451.349.347</b>			
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja.	14 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 14 Bulan	Tercapainya Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja	12 bulan	17.918.370.825	20.606.126.449	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Terpenuhinya Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap, Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	62 Orang 12 Bulan	Tercapainya Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja	12 bulan	2.327.231.768	2.676.316.533	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
2.18.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	1 Dokumen	Tercapainya Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja	12 bulan	120.782.500	138.899.875	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
2.18.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	Tersedianya Buku Besar, Tersedianya Buku Registrasi SPM, Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Akhir Tahun	24 Buku 24 Buku 3 Buah	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan	12 Bulan	26.092.600	30.006.490	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	DAU
<b>2.18.01.1.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>										<b>3.650.798.091</b>	<b>4.198.417.804</b>			
2.18.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Belanja Paket/Pengiriman, Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	80.705.000	92.810.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Kawat Faksimili/Internet	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	715.597.860	822.937.539	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Penyediaan Jasa Cleaning Service DPMPSTSP Aceh, Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan, Tersedianya Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Keamanan Lingkungan	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	469.019.640	539.372.586	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	298.679.555	343.481.488	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	301.574.729	346.810.938	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	28.342.985	32.594.433	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Perangkat Komunikasi Konferensi Virtual, Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Sewa Gudang Kantor	1 Paket 12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	85.000.000	97.750.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	37.920.000	43.608.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	139.750.000	160.712.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	438.114.000	503.831.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Mobil Dinas dan Kendaraan Roda 2 serta Pajak Kendaraan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	864.404.440	994.065.106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	191.689.882	220.443.364	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										362.603.800	416.994.370			
2.18.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	153 steel	Terciptanya keseragaman identitas dan disiplin pegawai Dinas	12 Bulan	128.785.800	148.103.670	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Bimtek dan Kursus-kursus	20 orang	Terlatihnya kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	20 orang	233.818.000	268.890.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sedang Berjalan	DAU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										1.094.783.505	1.259.001.031			
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										298.694.000	343.498.100			
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) (Triliun)	7 Triliun	Rekomendasi Perubahan Kebijakan Deregulasi Penanaman Modal, Terpetaknya Kondisi Kemudahan berusaha di Provinsi dan di seluruh Kab/Kota di Aceh, Tersusunnya Rancangan Awal Peraturan Deregulasi Penanaman Modal	1 Laporan 23 Kab/Kota 1 Rancangan Peraturan	Tersusunnya Rekomendasi Perubahan Kebijakan Deregulasi Penanaman Modal, Terpetaknya Kondisi Kemudahan berusaha di Provinsi dan di seluruh Kab/Kota di Aceh, Tersusunnya Rancangan Awal Peraturan Deregulasi	1 Laporan 23 Kab/Kota 1 Rancangan Peraturan	298.694.000	343.498.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi										796.089.505	915.502.931			
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) (Triliun)	7 Triliun	Penyusunan Prospektus Investasi, Terlaksananya Fasilitas Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN (Investor Pitching), Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha dan Wilayah, Terlaksananya Rapat Koordinasi Dialog Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Aceh, Terlaksananya Rapat-rapat Perencanaan Penanaman Modal.	1 Kajian 50 Orang 1 Dokumen 100 Orang 60 Orang	Tersusunnya Prospektus Investasi, Terfasilitasinya Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN (Investor Pitching), Tersusunnya Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha	1 Kajian 50 Orang 1 Dokumen 100 Orang 60 Orang	796.089.505	915.502.931	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										3.268.317.984	3.758.565.681			
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										3.268.317.984	3.758.565.681			
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) (Triliun)	7 Triliun	Jasa Pembuatan Website Promosi Investasi Aceh, Jasa Publikasi pada Platform Digital (Googel,Yuotube,Twitter), Kegiatan Aceh Investment Forum, Tersedianya Buku Potensi Investasi Aceh, Tersedianya Pengadaan Cinderamata.	1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan 750 Buah 200 Buah	Calon Investor Baru Meningkat	100 Perusahaan	1.426.433.928	1.640.399.017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) (Triliun)	7 Triliun	Terselenggaranya Aceh Investment Forum 2021 di Banda Aceh, Terselenggaranya Misi Investasi Luar Negeri/Kerjasama Kawasan IMT-GT, Terselenggaranya Regional Investment Forum (RIF).	1 Kali 1 Kali 1 Kali	Calon Investor Baru Meningkat	100 Perusahaan	1.841.884.056	2.118.166.664	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										3.033.494.692	3.488.518.896			
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota										3.033.494.692	3.488.518.896			
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	IKU/IKD -Jumlah Nilai Realisas PMA/PMDN PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5 indeks	Terlaksananya Sosialisasi Masterlist Kawasan Ekonomi Khusus, Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus.	40 Orang 12 Izin	Meningkatnya SDM Aparatur Penanaman Modal dalam Menyusun Masterlist KEK, Jumlah Izin dan Non Izin serta Fasilitas yang diterbitkan di KEK	40 Orang 12 Izin	999.999.499	1.149.999.424	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	IKU/IKD -Jumlah Nilai Realisas PMA/PMDN PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5 indeks	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang A, Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang B, Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang C	450 Izin dan Non Izin 450 Izin dan Non Izin 30000 Izin dan Non Izin	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di Bidang A, Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di Bidang B, Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di Bidang C	450 Izin dan Non Izin 450 Izin dan Non Izin 30000 Izin dan Non Izin	1.499.517.650	1.724.445.298	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	IKU/IKD -Jumlah Nilai Realisas PMA/PMDN PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5 indeks	Terselenggaranya Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Nonperizinan ke Kab/Kota, Terlaksananya Rapat Kerja PTSP, Tersusunnya Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Nonperizinan, Tersusunnya SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.	4 Kasus 20 Kab/Kota 75 Izin/Non izin 1Kegiatan 2 Buku 2 Buku	Tertanganinya Penanganan Kasus Pengaduan PTSP, Meningkatnya SDM Aparatur PTSP, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi perizinan dan Non Perizinan di Kab/Kota, Laporan Rapat Kerja PTSP, Tersusunnya Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Nonperizinan, Tersusunnya Buku SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.	4 Kasus 20 Kab/Kota 75 Izin/Non izin 1Kegiatan 2 Buku 2 Buku	533.977.543	614.074.174	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>										<b>713.900.000</b>	<b>820.985.000</b>			
<b>2.18.05.1.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>										<b>713.900.000</b>	<b>820.985.000</b>			
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	IKU/IKD -Jumlah Nilai Realisas PMA/PMDN PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Perusahaan	Pengadaan Aplikasi Sistem Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal (2016 - 2020)	1 Paket 30 Perusahaan 1 Buku	Tersedianya Aplikasi Sistem Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal (2016 - 2020)	1 Paket 30 Perusahaan 1 Buku	277.750.000	319.412.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal	IKU/IKD -Jumlah Nilai Realisas PMA/PMDN PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Perusahaan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Terlaksananya Publikasi Media Cetak/Surat Kabar, Terlaksananya Rapat Taskforce.	33 Perusahaan 4 Kali 4 Kali	Meningkatnya pengetahuan Perusahaan terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal, Tersampainya informasi tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke masyarakat, Terselainya permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan/investor (Rapat Taskforce).	33 Perusahaan 4 Kali 4 Kali	248.950.000	286.292.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	IKU/IKD -Jumlah Nilai Realisas PMA/PMDN PU - Aceh Kaya	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Perusahaan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42 Perusahaan	Laporan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42 Perusahaan	187.200.000	215.280.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>										<b>349.998.950</b>	<b>402.498.793</b>			
<b>2.18.06.1.01</b>	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>										<b>349.998.950</b>	<b>402.498.793</b>			
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	IKU/IKD -Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) PU - Aceh Kaya	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	Meningkatnya Penguatan Pemanfaatan serta Kapasitas Pendukung Sistem Informasi Penanaman Modal untuk Mengolah dan Menyajikan Data Perizinan dan Nonperizinan, Terlaksananya Administrasi Rutin pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, Terlaksananya Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, Terlaksananya Penyajian Data Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Laporan Penguatan Pemanfaatan serta Kapasitas Pendukung Sistem Informasi Penanaman Modal baik Data Perizinan dan Nonperizinan, Laporan Terlaksananya Administrasi Rutin pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, Laporan Terlaksananya Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Provinsi Laporan Terlaksananya Penyajian Data Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Provinsi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	349.998.950	402.498.793	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Baru	Migas Aceh

Banda Aceh, Agustus 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 199203 1 002